



POLITIK HUKUM ANTAR BANGSA (SIYASAH DAULIYAH INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA)

Zainul Erfan*¹, Ahmadi Hasan², Masyitah Umar³, Nuril Khasyiin⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: z.erfan9@gmail.com*

Received 28-04-2024 | Revised form 02-05-2024 | Accepted 09-06-2024

Abstract

This research explores Indonesia's role in the politics of international law, or Siyash Dauliyah, in the context of world peace. As one of the important countries in the international arena, Indonesia plays a significant role in maintaining global peace through various initiatives and active participation. Indonesia has long contributed to the mission of world peace, whether through sending peace aid, acting as a negotiator, or becoming a peacemaker in various disputes and conflicts between countries. Indonesia's voice is well heard by other countries, and its strategic role is recognized internationally. Indonesia's Siyash Dauliyah in world peace not only brings honor to the country's name, but also shows Indonesia's commitment to global stability and security. Indonesia's free, active and democratic foreign policy makes it a country capable of maintaining the global security ecosystem from various turmoil and conflict. Indonesia's participation in international organizations strengthens its role, especially among developing countries on their way to developed country status. In addition to engaging with Non-Aligned countries, Indonesia has also actively forged friendships with developed countries in the Western bloc, strengthening its bargaining power and position in the international arena. Participation in new organizations such as BRICS, which consists mainly of developed countries affiliated with the Eastern bloc, gives Indonesia the benefit of multiple blocs, enhancing its presence and role in international peace, stability and security.

Keywords: *Politics, Law, Interstate, Peace*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran Indonesia dalam politik hukum internasional, atau Siyash Dauliyah, dalam konteks perdamaian dunia. Sebagai salah satu negara penting dalam arena internasional, Indonesia memainkan peran signifikan dalam menjaga perdamaian global melalui berbagai inisiatif dan partisipasi aktif. Indonesia telah lama berkontribusi pada misi perdamaian dunia, baik melalui pengiriman bantuan perdamaian, bertindak sebagai negosiator, maupun menjadi juru damai dalam berbagai sengketa dan konflik antar negara. Suara Indonesia didengar dengan baik oleh negara-negara lain, dan peran strategisnya diakui secara internasional. Siyash Dauliyah Indonesia dalam perdamaian dunia tidak hanya membawa harum nama negara, tetapi juga memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas dan keamanan global. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, dan demokratis menjadikannya sebagai negara yang mampu menjaga ekosistem keamanan global dari berbagai gejolak dan konflik. Partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional memperkuat perannya, khususnya di antara negara-negara berkembang yang sedang menuju status negara maju. Selain berhubungan dengan negara-

negara Non-Blok, Indonesia juga aktif menjalin persahabatan dengan negara-negara maju di blok Barat, memperkuat daya tawar dan posisinya di kancah internasional. Keikutsertaan dalam organisasi baru seperti BRICS, yang sebagian besar beranggotakan negara-negara maju yang terafiliasi dengan blok Timur, memberikan Indonesia manfaat dari berbagai blok, meningkatkan eksistensi dan peranannya dalam perdamaian, stabilitas, dan keamanan dunia internasional.

Kata Kunci: Politik, Hukum, Antar negara, Perdamaian

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan politik Indonesia di arena internasional mencerminkan posisi negara ini sebagai salah satu pemain kunci dalam diplomasi regional dan global. Beberapa aspek penting terkait politik Indonesia di tingkat internasional di antaranya Pemilihan Non-Blok dan Kebijakan Tidak Memihak Blok sejak merdeka, Indonesia telah menegaskan komitmennya sebagai pendukung politik luar negeri yang independen dari aliansi militer yang berlawanan. Kebijakan ini tercermin dalam prinsip non-blok dan ketidakmemihak blok, yang menegaskan posisi Indonesia sebagai mediator netral dalam konflik internasional.

Partisipasi aktif dalam organisasi internasional, Indonesia menjadi anggota yang berperan dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB, ASEAN, G20, dan Gerakan Non-Blok. Keaktifan ini memungkinkan Indonesia untuk memberikan kontribusi dalam menyelesaikan konflik global, mempromosikan perdamaian dan keamanan, serta memperjuangkan isu-isu kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan. Peran sebagai mediator dalam konflik regional, Indonesia sering bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik regional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Contohnya, Indonesia memfasilitasi perundingan perdamaian di Aceh dan Papua Barat. Kontribusi dalam isu global, Indonesia memiliki peran penting dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, penanggulangan terorisme, dan pemeliharaan perdamaian dunia. Negara ini sering menjadi suara bagi negara-negara berkembang dalam forum internasional.

Jejaring hubungan bilateral yang luas, Indonesia menjalin hubungan bilateral yang luas dengan negara-negara di seluruh dunia, yang mencakup kerja sama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kedaulatan maritim, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan di jalur perdagangan laut internasional. Kebijakan maritim Indonesia menekankan pentingnya kedaulatan maritim dan kerja sama regional dalam mengatasi tantangan di laut. Secara keseluruhan, politik Indonesia di tingkat internasional mencerminkan komitmen negara ini untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan keadilan global, sambil tetap memperjuangkan kepentingan nasional dan regional.

Kebijakan luar negeri Indonesia merangkum beragam aspek yang ditujukan untuk memajukan kepentingan nasional, mengawal kedaulatan, serta

berperan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas baik di tingkat regional maupun global. Politik luar negeri Indonesia menggunakan asas prinsip Pancasila dan kedaulatan nasional, yaitu dasar kebijakan luar negeri Indonesia adalah prinsip-prinsip Pancasila, yang mengadvokasi nilai-nilai seperti keadilan, kemerdekaan, perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan. Prinsip ini digunakan untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah, serta mendorong kerjasama internasional yang berlandaskan pada perdamaian.

Indonesia memiliki misi untuk mempromosikan stabilitas, perdamaian, dan keamanan di tingkat regional dan global. Ini mencakup beberapa aspek, yaitu partisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB, peran sebagai mediator dalam konflik, bantuan kemanusiaan dalam penanganan bencana, diplomasi multilateral untuk penyelesaian konflik, peran dalam pembangunan berkelanjutan.

Siyasah Dauliyah yang diterjemahkan sebagai "kebijakan luar negeri" Indonesia ini mencakup semua keputusan, strategi, dan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain di luar wilayahnya sendiri. Hubungan antara *Siyasah Dauliyah* dan BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) melibatkan partisipasi negara-negara BRICS dalam diplomasi global dan interaksi mereka dengan negara-negara lain di dunia. Sebagai contoh, kerjasama ekonomi dan politik, negara-negara BRICS memiliki kebijakan luar negeri masing-masing yang sering kali mencakup upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara lain di luar kelompok BRICS. Mereka mungkin berusaha untuk memperluas kerjasama dagang, investasi, dan diplomasi dengan negara-negara di wilayah mereka maupun di seluruh dunia.

Peran dalam Organisasi Internasional pada negara-negara BRICS secara kolektif dan individual memainkan peran penting dalam organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan G20. Mereka menggunakan *Siyasah Dauliyah* mereka untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan di forum-forum ini, serta untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri serta kepentingan negara-negara berkembang secara umum. Diplomasi dan mediasi sebagai kelompok negara dengan pengaruh ekonomi dan politik yang signifikan, BRICS dapat menggunakan *Siyasah Dauliyah* mereka untuk bertindak sebagai mediator dalam konflik regional atau internasional, serta untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai.

Dengan demikian, hubungan antara *Siyasah Dauliyah* dan BRICS melibatkan upaya negara-negara BRICS untuk memperkuat posisi dan kepentingan mereka di dunia melalui kerjasama ekonomi, diplomasi, dan partisipasi dalam organisasi internasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, ada dua persoalan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Persoalan yang pertama adalah mengenai penerapan politik hukum dan peran *Siyasah Dauliyah* Indonesia. Kedua mengenai peran BRICK, apakah mampu menjadi solusi alternatif. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaiman penerapan politik hukum dan peran *Siyasah Dauliyah* Indonesia pada aspek perdamaian dunia dalam kancah Internasional ?
2. Bagaimana peran BRICK dalam politik hukum Internasional dan apakah mampu menjadi solusi alternatif bagi *Siyasah Dauliyah* Indonesia pada aspek perdamaian dunia dalam kancah Internasional ?

B. Pembahasan

1. *Siyasah Dauliyah* dan Politik Hukum Indonesia Pada Aspek Perdamaian Dunia

Menurut Wahbah al-Zuahaili, prinsip utama hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian. Perang hanya dianggap sebagai keadaan darurat yang diperlukan untuk mencegah keburukan dan membuka jalan bagi dakwah, bebas dari segala rintangan.¹

Secara etimologis, kata "*dauliyah*" berasal dari bahasa Arab "الدولية" (*ad-dauliyah*), yang berasal dari kata dasar "دولة" (*dawlah*) yang berarti "negara" atau "pemerintahan". Oleh karena itu, "*dauliyah*" dalam konteks ini mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan negara atau pemerintahan, seringkali dalam konteks internasional. Jadi, *Siyasah Dauliyah* dapat diartikan sebagai "politik internasional" atau "politik antarnegara".² *Siyasah Dauliyah* terbagi dua, pertama, *al-Siyasah al-Duali al-Khassah* atau hukum perdata internasional, kedua, *al-Siyasah al-Duali al-Amm* atau hubungan internasional, politik dan perdamaian.³

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama dalam *Siyasah Dauliyah* dan kemudian dijadikan ukuran apakah *siyāsah dauliyah* berjalan sesuai dengan semangat Islam adalah berikut :

a. Kesatuan Umat Manusia

Walaupun manusia berbeda-beda suku, bangsa, warna kulit, tanah air bahkan bereda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama mahluk Allah yang menghuni bumi dengan harapan yang sama untuk memiliki hidup yang bahagia dan damai. Untuk itu, maka segala macam perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif demi saling

¹ Muhammad Ashri mengutip Wahbah Al-Zuhaili, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t), hlm. 231.

² Ija Suntana, "*Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*", Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm.15.

³ Iqbal Mhammad, "*Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Islam*", Jakarta, Prenadamedia, 2014, 220-221.

memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.⁴

b. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Dalam hal ini, hidup berdampingan dengan damai akan terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik itu di antara manusia ataupun di antara berbagai negara. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam wajib menegakkan keadilan baik itu pada diri sendiri, keluarga, baik terhadap musuhpun mewajibkan untuk bertindak adil.

c. *Al- Musawah* (Persamaan)

Artinya manusia memiliki hak kemanusiaan yang sama. Demi terwujudnya keadilan maka manusia harus sama di depan hukum. Segala macam kerjasama internasional akan sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa. Demikian yang dilakukan oleh para sahabat yang membebaskan para budak adalah untuk mewujudkan persamaan kemanusiaan sebab yang membedakan manusia dengan manusia lainnya adalah ketakwaannya.

d. *Al-Karomah Al-Insaniyah* (Kehormatan Manusia)

Manusia tidak boleh merendahkan manusia lain dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya. Bagaimanapun kehormatan suatu kaum dan komunitas dapat berujung menjaadi kehormatan bagi negara itu sendiri. Kerjasama interasional tidak dapat dikembangkan apabila tidak berlandaskan saling menghormati.

e. *Al-Tasamuh* (Toleransi)

Toleransi di sini tidak berarti harus menyerah terhadap kejahatan ataupun memberi peluang kepada kejahatan. Allah telah memerintahkan untuk menolak permusuhan dan menciptakan tindakan yang lebih baik yang kemudian akan menimbulkan persahabatan, bahkan dapat menetralsir ketegangan. Pemaaf merupakan sifat yang terpuji. Pemaaf yang baik adalah pemaaf yang disertai harga diri yang wajar, bukan pemaaf dalam arti menyerah dan merendahkan diri terhadap kejahatan.

f. Kerjasama Kemanusiaan

Kerjasama kemanusiaan ini merupakan realisasi dari dasar-dasar yang dikemukakan sebelumnya. Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama di setiap hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Kerjasama ini diperlukan, sebab ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antar negara didunia.

g. *Al-Hurriyyah* (Kebebasan, Kemerdekaan)

Kebebaasan disini bukanlah kebebasan yang mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan daan kemaslahatan hidup manusia di dunia, kebebasan tersebut diantaranya, 1)

⁴ H.A. Djazuli, "*Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*", Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 122.

kebebasan berpikir, yang akan mendorong manusia supaya terbebas dari keraguan dan taqlid. 2) kebebasan beragama. 3) kebebasan menyatakan pendapat, dalam hal ini adalah berkaitan dengan al-akhlak al-karimah dan kemaslahatan umum dalam rangka amar maruf nahi munkar adalah wajib. 4) kebebasan menuntut ilmu. 5) kebebasan memiliki harta.

h. *Al-Akhlak al-Karimah* (Perilaku Moral yang baik)

Dasar terakhir ini merupakan dasar moral dalam hubungan antar manusia maupun antar bangsa di dunia. Selain itu juga prinsip ini diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi. Memiliki perilaku moral yang baik dalam hal ini dapat tercermin dengan timbulnya kepedulian terhadap orang-orang yang lemah. Bangsa yang lemah dan miskin serta mau menepati janji.

Definisi mengenai politik hukum banyak dijumpai di berbagai referensi oleh beberapa pakar, namun Mahfud menggaris-bawahi bahwa definisi politik hukum, antara lain: "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara".⁵

Sejalan dengan Padmo wahjono yang berpendapat bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang ingin dibentuk, penegasannya bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu di dalamnya yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.⁶

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam panorama keislaman global. Dengan lebih dari 200 juta penduduk Muslim, Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk arah pemikiran, budaya, dan praktik keagamaan di seluruh dunia Islam. Selain itu, Indonesia juga menampilkan ragam praktik Islam yang mencerminkan keragaman tradisi keagamaan, kepercayaan, dan budaya di tengah masyarakatnya.

Kehadiran Islam di Indonesia memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk identitas nasional dan sifat pluralistik negara. Indonesia menjunjung tinggi prinsip toleransi antaragama dan keanekaragaman budaya, yang tercermin dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika ("Berbeda-beda tetapi tetap satu"). Prinsip ini menjadi dasar bagi kerukunan sosial dan kerjasama antarumat beragama di Indonesia.

Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia juga memiliki peran yang penting dalam diplomasi Islam global. Negara ini aktif dalam berbagai organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan Islam, seperti

⁵ Moh. Mahfud, *Politik Hukum*, hlm. 5.

⁶ Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, hlm. 11.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab, di mana Indonesia mengadvokasi perdamaian, dialog antaragama, dan kerjasama ekonomi.

Indonesia juga menjadi pusat pembelajaran Islam yang penting di tingkat internasional. Dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan tradisi keilmuan yang kuat, Indonesia telah menjadi tujuan utama bagi para pelajar dan akademisi Islam dari berbagai belahan dunia.

Sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar, Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat identitas Islam, mempromosikan kerukunan antarumat beragama, dan memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di tingkat global.

Dalam Islam, beberapa hadis menekankan pentingnya merasakan penderitaan sesama Muslim dan menunjukkan empati serta solidaritas dalam mengatasinya. Salah satu hadis yang relevan adalah dari Nu'man bin Basyir yang meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ
بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى

Artinya :*"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)."* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menggambarkan bahwa umat Muslim seharusnya bersatu seperti satu tubuh; ketika salah satu bagian menderita, seluruh tubuh turut merasakan kesulitan tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kita diharapkan untuk berempati dan memberikan bantuan kepada sesama Muslim yang sedang menderita.

Dengan demikian, hadis ini menekankan pentingnya solidaritas, belas kasihan, dan dukungan antar sesama Muslim, serta menegaskan bahwa mengatasi penderitaan dan kesulitan sesama Muslim adalah tanggung jawab kolektif seluruh komunitas Muslim. Kalimat "bagaikan satu tubuh" merupakan ilustrasi indah yang menunjukkan soliditas dan persatuan umat Islam, serta sikap responsif terhadap penderitaan orang lain yang diilustrasikan dengan anggota tubuh yang tidak bisa tidur atau panas.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, perumpamaan umat Islam bagaikan satu tubuh sangatlah tepat untuk mendekatkan pemahaman dan memunculkan makna yang jelas. Makna perumpamaan ini adalah penghargaan terhadap hak-hak umat Islam dan anjuran untuk saling mengasihi dan membantu satu sama lain. Bukankah Allah SWT telah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin adalah penolong bagi sebagian yang lain?

Surat at-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana" (Q.S. At-Taubah:71).

Surat Al Baqarah Ayat 224 :

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menegaskan karakteristik orang-orang beriman yang saling menjadi penolong bagi satu sama lain yang dapat diwujudkan dalam tiga aspek:

Pertama, orang-orang beriman selalu berusaha untuk bersinergi, berkolaborasi, dan saling membantu sesama atas dasar keimanan, kebajikan, dan ketakwaan. Kedua, orang-orang beriman selalu berupaya melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, serta memelopori kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan umat dan bangsa. Ketiga, orang-orang beriman selalu berusaha memperkuat tauhid dengan menegakkan shalat dan menunjukkan solidaritas kemanusiaan melalui penunaian zakat, infak, dan sedekah.⁷

Siyasah Dauliyah adalah frasa Arab yang merujuk pada kebijakan luar negeri. Ketika diterapkan pada konteks Indonesia, istilah "*Siyasah Dauliyah* Indonesia" menggambarkan kebijakan luar negeri Indonesia, yang mencakup strategi, tujuan, dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengelola hubungan dengan negara-negara lain serta berpartisipasi dalam isu-isu global.

Sebagai negara dengan populasi besar, sumber daya alam yang kaya, dan letak geografis yang strategis, Indonesia memegang peran kunci dalam diplomasi regional dan global. Dasar dari kebijakan luar negeri Indonesia adalah prinsip-prinsip Pancasila, yang menekankan perdamaian, kemerdekaan, keadilan, demokrasi, dan persatuan. Indonesia juga mengikuti prinsip non-blok, yang berarti tidak bergabung dengan aliansi militer tertentu dan berupaya mempertahankan netralitas dalam konflik internasional.

"*Siyasah Dauliyah* Indonesia" meliputi berbagai aspek, termasuk diplomasi politik, ekonomi, budaya, dan keamanan. Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), G20, dan Gerakan Non-Blok, dengan tujuan mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama antarnegara. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam upaya penyelesaian konflik regional dan

⁷ Sumber: <https://nu.or.id/ilmu-al-quran/9-ayat-perdamaian-dalam-al-qur-an-d8KgR>

internasional sebagai mediator, mendukung isu-isu kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan, serta memperjuangkan kepentingan nasional dan regional dalam forum-forum internasional.

"*Siyasah Dauliyah Indonesia*" beradaptasi dengan perubahan dalam dinamika regional dan global serta prioritas nasional. Namun, prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan, perdamaian, kerjasama, dan keadilan tetap menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia mencerminkan pendekatan yang berakar pada nilai-nilai inti, tujuan domestik, dan aspirasi global Indonesia.

Beberapa prinsip politik luar negeri Indonesia yang pokok, yaitu : Pertama, Pancasila sebagai fondasi filsafat negara, Pancasila menjadi landasan sentral dari kebijakan luar negeri Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti perdamaian, keadilan, dan demokrasi, menjadi panduan utama dalam upaya diplomasi Indonesia di dunia internasional. Kedua, kedaulatan dan kemerdekaan, Indonesia menekankan pentingnya kedaulatan dan kemerdekaan dalam mengelola hubungan luar negeri. Negara ini berkomitmen untuk menjaga otonomi dan independensi dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Ketiga, non-blok, kebijakan non-blok menjadi salah satu pilar esensial dalam politik luar negeri Indonesia. Hal ini menandakan bahwa Indonesia tidak terikat pada aliansi militer tertentu dan berupaya untuk tetap netral dalam konflik internasional. Keempat, kerjasama regional, sebagai anggota aktif ASEAN dan berbagai forum regional lainnya, Indonesia mendorong kerjasama di tingkat regional untuk mencapai tujuan bersama seperti perdamaian, stabilitas, dan kemajuan ekonomi. Kelima, kemanusiaan, Indonesia memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan luar negerinya. Negara ini aktif terlibat dalam bantuan kemanusiaan, penanganan konflik, dan pemeliharaan perdamaian di tingkat regional maupun global. Keenam, hukum internasional, Indonesia menghormati dan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dalam mengelola hubungan luar negerinya. Ini termasuk menegakkan hukum internasional dalam menangani konflik dan perselisihan. Ketujuh, pembangunan berkelanjutan, Indonesia berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Prinsip ini tercermin dalam keterlibatan Indonesia dalam kerjasama internasional untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kedelapan, diplomasi aktif, Indonesia menerapkan diplomasi aktif, yang melibatkan partisipasi proaktif dalam upaya perdamaian, dialog, dan mediasi untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan stabilitas di tingkat regional dan global.

Prinsip-prinsip ini memberikan arahan dan kerangka kerja bagi kebijakan luar negeri Indonesia, yang bertujuan untuk memajukan kepentingan nasional, perdamaian, dan kerjasama di tingkat internasional. Hubungan internasional Indonesia mengacu pada interaksi dan diplomasi negara ini dengan negara-

negara lain di tingkat global. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hubungan internasional Indonesia. Indonesia menjadi anggota berbagai organisasi internasional yang mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Beberapa organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia yaitu :

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia telah aktif dalam forum ini sejak tahun 1950, yang fokusnya adalah perdamaian dan kerjasama internasional. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967 dan berperan penting dalam pembangunan regional serta kerjasama di Asia Tenggara. G20, Indonesia sebagai anggota G20, Indonesia berpartisipasi dalam forum yang membahas isu-isu ekonomi global, keuangan, dan pembangunan yang berkelanjutan. APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*), sebagai anggota APEC, Indonesia terlibat dalam forum kerjasama ekonomi Asia-Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di wilayah tersebut. IORA (*Indian Ocean Rim Association*), pada tahun 1995, Indonesia menjadi anggota IORA yang berfokus pada kerjasama ekonomi, sosial, dan keamanan di kawasan Samudra Hindia. *Non-Aligned Movement* (Gerakan Non-Blok), sejak tahun 1961, Indonesia adalah anggota Gerakan Non-Blok yang mewakili koalisi negara-negara yang tidak terikat pada blok politik tertentu. OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Indonesia adalah salah satu pendiri OKI pada tahun 1969, sebuah forum yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar-negara anggota dan mempromosikan nilai-nilai Islam. WTO (*World Trade Organization*), sejak tahun 1995, Indonesia telah menjadi anggota WTO yang bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional dan menyelesaikan sengketa perdagangan. ITU (*International Telecommunication Union*), Indonesia adalah anggota ITU yang berupaya mengkoordinasikan penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat global. WHO (*World Health Organization*), sebagai anggota WHO, Indonesia terlibat dalam upaya global untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengatasi penyakit menular dan tidak menular. UNESCO menyatakan bahwa pendidikan untuk toleransi harus diarahkan untuk melawan pengaruh yang mengarah pada ketakutan dan pengucilan terhadap orang lain, serta harus membantu pemuda mengembangkan kemampuan untuk menilai secara independen, berpikir kritis, dan melakukan penalaran etis. Keanekaragaman agama, bahasa, budaya, dan etnis di dunia bukanlah alasan terjadinya konflik, melainkan sesuatu yang memperkaya kita semua.⁸

Partisipasi Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional ini mencerminkan komitmennya untuk berkontribusi pada perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan kerjasama global. Lebih lanjut, misi perdamaian

⁸ Novia Aisyah, "Fakta Hari Toleransi Internasional, Pasca Konflik Rasial dan Budaya", Detik Edu. hlm.

Indonesia mengacu pada keterlibatan negaranya dalam operasi perdamaian yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau misi-misi serupa, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas di daerah-daerah yang terkena konflik. Berikut beberapa contoh misi perdamaian yang melibatkan Indonesia:

Melalui Pasukan PBB, Indonesia telah mengirim personel militer dan polisi untuk terlibat dalam misi perdamaian PBB di beberapa negara, seperti Lebanon, Kongo, Sudan Selatan, dan Timor Leste. Tugas mereka mencakup pemantauan gencatan senjata, mendukung proses pemulihan pasca-konflik, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak. Indonesia juga berpartisipasi dalam UNIFIL, misi yang bertujuan untuk menjaga perdamaian di wilayah selatan Lebanon setelah konflik antara Israel dan Lebanon pada 2006. Pasukan Indonesia membantu menjaga stabilitas dan mendukung pemerintah Lebanon dalam menguasai sepenuhnya wilayahnya. Terlibat dalam UNAMID: Di Darfur, Sudan, Indonesia juga turut serta dalam UNAMID yang bertujuan melindungi warga sipil, mendukung penyelesaian konflik, dan memfasilitasi rekonsiliasi di wilayah tersebut. Keikutsertaan dalam INTERFET pada tahun 1999, Indonesia bergabung dengan INTERFET yang dipimpin oleh Australia untuk menjamin stabilitas dan keamanan di Timor Leste setelah referendum kemerdekaan.

Indonesia juga sangat aktif berperan dalam Misi Perdamaian ASEAN: Selain misi PBB, Indonesia juga terlibat dalam inisiatif perdamaian ASEAN, seperti di Aceh, di mana negara ini memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik dan mendukung proses perdamaian antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian menunjukkan keseriusannya dalam berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global, serta dalam memegang teguh nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan.

2. World War dan Peran Indonesia Dalam Kancah Dunia Internasional Pada Aspek Perdamaian Dunia dan BRICS Sebagai Solusi Alternatif

Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah sebuah situasi yang rumit dan sensitif di tingkat regional dan internasional. Latar belakang konflik antara Rusia dan Ukraina dimulai pada tahun 2014 setelah Rusia mengambil alih Crimea dan pemberontakan pecah di wilayah timur Ukraina. Pemberontakan ini diikuti oleh pendirian republik-republik yang diproklamasikan secara sendiri oleh kelompok separatis yang didukung oleh Rusia. Ini menyebabkan konflik bersenjata antara pemerintah Ukraina dan pasukan separatis yang mendapat dukungan dari Rusia.

Penyerapan Crimea pada Maret 2014, Rusia menyerap Crimea dari Ukraina setelah dilakukan referendum yang diakui oleh Moskow tetapi dianggap ilegal oleh mayoritas negara-negara lainnya. Hal ini memicu tegang hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat, serta mengakibatkan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Barat terhadap Rusia.

Konflik di Donbas, wilayah timur Ukraina, khususnya di Donetsk dan Luhansk, terjadi konflik antara pasukan pemerintah Ukraina dengan kelompok separatis yang didukung oleh Rusia. Konflik ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan merusak infrastruktur di wilayah tersebut. Peran Internasional dalam konflik antara Rusia dan Ukraina telah menarik perhatian dan campur tangan dari banyak pihak di tingkat internasional. Beberapa negara Barat memberikan dukungan politik dan militer kepada Ukraina, sementara Rusia mendapat dukungan dari kelompok separatis di wilayah timur Ukraina. Upaya mediasi juga telah dilakukan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara lain untuk mencapai perdamaian.

Perundingan dan upaya perdamaian terus dilakukan meskipun telah ada upaya perundingan dan gencatan senjata, konflik tersebut masih berlanjut dengan intensitas yang berfluktuasi. Upaya perdamaian terus dilakukan, tetapi tantangan politik, militer, dan diplomatik tetap menjadi penghalang utama. Dampak konflik antara Rusia dan Ukraina telah terasa luas di tingkat regional maupun internasional, dan penyelesaiannya masih menjadi masalah yang rumit dan sulit.

Ada lagi yang terkini, yaitu konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dan merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks di dunia. Konflik ini melibatkan sengketa wilayah, hak asasi manusia, agama, serta pertempuran kepentingan politik dan ekonomi.

Penyebab konflik ini sangat kompleks, tetapi beberapa faktor utama, pertama, Sengketa Tanah, Israel dan Palestina bersaing untuk klaim atas tanah di wilayah Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Sengketa ini mencakup hak atas Yerusalem, khususnya situs-situs suci bagi agama Yahudi, Islam, dan Kristen. Kedua, Pemukiman Israel, negara Israel membangun pemukiman-pemukiman di wilayah yang diakui secara internasional sebagai wilayah Palestina. Hal ini menjadi sumber ketegangan dan konflik dengan Palestina dan komunitas internasional. Ketiga, Ketegangan Politik dan Agama di mana konflik ini juga didorong oleh ketegangan politik dan agama antara pemerintah Israel dan otoritas Palestina, serta antara pendukung Israel dan Palestina.

Lebih lanjut, keempat, Kekerasan dan Terorisme, klaim sepihak oleh Israel yaitu "serangan terorisme" oleh kelompok-kelompok Palestina seperti Hamas, serta tindakan represif oleh pemerintah Israel, telah memperburuk konflik dan menyebabkan banyak korban jiwa di kedua sisi. Sejarah konflik ini telah ditandai dengan serangkaian perang, serangan udara, serangan roket, dan serangan bunuh diri, yang semuanya telah mengakibatkan ribuan kematian dan penderitaan di antara warga sipil Israel dan Palestina.

Upaya-upaya perdamaian telah dilakukan selama bertahun-tahun, termasuk negosiasi langsung antara Israel dan Palestina, serta intervensi pihak ketiga oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, sulitnya mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak telah menyulitkan penyelesaian konflik ini. Konflik Israel-Palestina telah menyebabkan

banyak penderitaan di antara warga sipil dari kedua belah pihak. Beberapa contoh tragedi kemanusiaan yang terjadi selama konflik ini mencakup korban jiwa warga sipil, serangan udara, serangan artileri, dan kekerasan lainnya telah menyebabkan ribuan kematian di antara warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, menyebabkan jutaan warga Palestina kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka, membuat mereka menjadi pengungsi.

Blokade dan pembatasan Israel menerapkan blokade di Jalur Gaza, yang menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan akses ke layanan kesehatan yang memadai bagi penduduk setempat. Zona konflik pada area-area seperti Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza menjadi tempat di mana warga sipil terus menderita akibat ketegangan dan kekerasan yang berkelanjutan. Penghancuran infrastruktur dan serangan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya telah mengakibatkan kerusakan luas dan mengganggu kehidupan sehari-hari warga Palestina.

Trauma psikologis konflik ini telah meninggalkan dampak psikologis yang traumatis, terutama pada anak-anak, yang terpaksa hidup dalam lingkungan yang penuh ketegangan dan kekerasan. Tragedi kemanusiaan ini menyoroti pentingnya mencapai solusi damai dan berkelanjutan untuk konflik Israel-Palestina, dengan tujuan mengakhiri penderitaan warga sipil dan memulai proses rekonsiliasi serta pemulihan. Konflik ini masih berlanjut hingga hari ini, meskipun ada periode gencatan senjata yang sesekali tercapai. Masyarakat internasional terus berupaya mendorong dialog antara kedua belah pihak dan mencari solusi yang berkelanjutan untuk konflik yang merusak ini.

Berikutnya, ada potensi konflik antara China dan Taiwan telah menjadi perhatian utama dalam politik regional dan global. Beberapa faktor yang meningkatkan potensi perang antara kedua belah pihak menyangkut kedaulatan dan sengketa wilayah, China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang tak terpisahkan dan berkomitmen untuk penyatuan kembali, sementara Taiwan telah berfungsi sebagai entitas yang berdaulat dengan pemerintahan sendiri. Ketegangan meningkat karena China semakin menekankan klaim kedaulatannya atas Taiwan.

Retorika dan kebijakan militer baik China maupun Taiwan telah meningkatkan retorika yang keras terkait status politik Taiwan. China telah meningkatkan kehadiran militernya di sekitar Taiwan, termasuk melalui latihan militer yang intensif, yang sering kali dianggap sebagai ancaman oleh Taiwan. Faktor dukungan asing untuk Taiwan juga menambah panas, Taiwan mendapat dukungan dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat, yang menegaskan komitmennya terhadap keamanan Taiwan. Ini dapat memicu respons dari China, yang menganggap campur tangan asing sebagai ancaman terhadap kedaulatannya.

Kawasan strategis dan ekonomi antara Cina dan Taiwan memiliki posisi strategis yang penting di kawasan Asia Pasifik, dan konflik dengan Taiwan dapat

memiliki dampak serius pada stabilitas regional. Selain itu, Taiwan juga merupakan pusat teknologi dan produksi global, sehingga konflik dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Nasionalisme dan identitas kedua belah pihak memiliki narasi nasionalis yang kuat terkait dengan kedaulatan dan identitas nasional mereka. Sentimen nasionalisme yang tinggi dapat memperumit upaya penyelesaian damai dan meningkatkan potensi konflik. Meskipun ada faktor-faktor yang meningkatkan potensi konflik antara China dan Taiwan, masih ada upaya diplomatik untuk mencegah eskalasi ke arah perang. Namun, kondisi politik dan keamanan di kawasan tersebut tetap rapuh, dan perhatian terus diberikan pada perkembangan situasi ini.

Potensi pecahnya perang dunia ketiga merupakan masalah yang sangat serius dan membutuhkan perhatian mendalam dari komunitas internasional. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik global ini seperti persaingan kekuatan besar. Persaingan geopolitik antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China dapat menimbulkan ketegangan yang meningkat dan memicu konflik militer yang meluas. Dengan memanasnya konflik regional dan belum terselesaikan, terutama di wilayah seperti Timur Tengah, Asia Tengah, dan Laut Cina Selatan, memiliki potensi untuk melibatkan kekuatan besar dan memperbesar risiko eskalasi konflik.

Yang lebih memprihatinkan juga ialah ancaman senjata nuklir. Kehadiran senjata nuklir di beberapa negara, disertai dengan retorika keras tentang penggunaannya, meningkatkan potensi konflik yang melibatkan senjata pemusnah massal. Keterlibatan militer yang ekstrem, langkah-langkah militer yang ekstrem atau tanpa pertimbangan yang matang dari negara-negara besar dapat memicu serangkaian reaksi yang merembet dan menyebabkan konflik yang lebih luas. Perang informasi dan siber serta pemanfaatan teknologi informasi dan serangan siber terhadap infrastruktur vital serta penyebaran propaganda dapat memperkeruh ketegangan antar negara dan memperburuk situasi konflik. Oleh sebab itu, mencegah terjadinya perang dunia ketiga memerlukan upaya diplomasi yang gigih, kerja sama internasional yang erat, dan komitmen bersama untuk menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini membutuhkan kesadaran akan dampak yang mengerikan dari perang besar dan upaya bersama secara global untuk menghindarinya.

Fiqh Siyasah Dauliyah termasuk dalam kajian Ketatanegaraan Islam, yang merupakan studi akademis tentang kekuasaan dan keteraturan masyarakat dari perspektif Islam, mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah, dan pemikiran para tokoh. Dalam ketatanegaraan Islam juga dibahas mengenai perang untuk mempertahankan kedaulatan wilayah. Banyak yang menyamakan istilah perang dengan seruan jihad. Sesuai dengan namanya sebagai agama damai dan sejahtera, Islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerja sama dengan negara mana pun. Oleh karena itu, Allah tidak mengizinkan umat Islam melakukan perang untuk ekspansi ke negara lain. Perang hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat

mendesak dan hanya untuk tujuan pembelaan diri (defensif). Para ulama juga telah merumuskan sebuah prinsip dalam hubungan internasional⁹, yaitu:

الأصلُ فِي العَلاقَةِ نُورُ السَّلامِ

Artinya :*"Pada dasarnya, landasan hubungan antarnegara adalah perdamaian."*

Indonesia yang mayoritas muslim dianggap sebagai kunci penting dalam menjaga perdamaian dunia karena beberapa faktor, posisi geografis yang Penting, letak geografis Indonesia yang strategis, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadikannya sebagai titik hub antara berbagai wilayah dan peradaban di dunia. Dengan keterhubungan yang luas dengan negara-negara di Asia, Pasifik, dan Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi fasilitator dialog antarnegara dan menjembatani perbedaan.

Keragaman budaya dan agama, Indonesia dikenal akan keragaman budaya, etnis, dan agama. Harmoni relatif di antara berbagai kelompok budaya dan agama di Indonesia memberikan teladan tentang bagaimana pluralisme dapat menjadi sumber kekuatan, bukan konflik. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda namun tetap satu", mencerminkan semangat toleransi yang terus diperjuangkan.

Tradisi diplomasi damai yang kuat, Indonesia telah lama memiliki tradisi dalam diplomasi damai. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah aktif dalam mediasi konflik di tingkat regional dan internasional, termasuk di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Prinsip politik luar negeri Indonesia yang berdasarkan pada ketidakpilihan blok dan non-intervensi telah memperkuat citra negara ini sebagai mediator netral dan dapat dipercaya.

Partisipasi aktif dalam organisasi internasional, Indonesia merupakan anggota aktif dalam berbagai organisasi internasional, termasuk PBB, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok. Partisipasi aktif ini memberikan Indonesia kesempatan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian konflik global, meningkatkan dialog antar negara, dan mempromosikan perdamaian dunia.

Peran dalam pembangunan berkelanjutan, sebagai negara dengan populasi besar dan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia memiliki peran penting dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan melestarikan lingkungan hidup di Indonesia memiliki dampak besar dalam mempromosikan perdamaian global. Potensi ekonomi yang signifikan menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dengan pertumbuhan yang stabil dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan menjaga stabilitas ekonomi dan mempromosikan investasi yang berkelanjutan, Indonesia dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya membangun perdamaian global. Melalui

⁹ A. Ratna Wulan, *"Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik (Siyasah Dauliyah)"*, Bandung, eJurnal Sunan Gunung Jati, hlm.11.

keragaman budaya, komitmen terhadap diplomasi damai, partisipasi dalam organisasi internasional, peran dalam pembangunan berkelanjutan, dan potensi ekonominya, Indonesia dianggap sebagai elemen kunci dalam menjaga perdamaian dunia.

Menurut Wallensteen, dalam resolusi konflik terdapat mekanisme penyelesaian konflik, di antaranya:

- a. Mengubah prioritasnya, mekanisme pertama ini menunjukkan bahwa satu pihak mengubah prioritasnya sehingga mempengaruhi pihak B dan terjadilah resolusi.
- b. Melakukan pembagian sumber daya secara adil.
- c. "*Horse trading*", mekanisme ketiga dilakukan dengan cara memberikan masing-masing pihak tuntutan yang berbeda.
- d. Kontrol bersama, mengintegrasikan masyarakat yang terfragmentasi.
- e. Memberikan kontrol kepada pihak ketiga, mekanisme ini dilakukan dengan cara memberikan kontrol atas sumber daya kepada pihak ketiga.
- f. Arbitrasi atau mekanisme hukum lainnya.
- g. Dibiarkan atau dilupakan, mekanisme ketujuh ini akan membiarkan konflik berakhir begitu saja tanpa adanya mekanisme khusus yang dilakukan, baik itu oleh pihak terkait maupun dengan bantuan pihak lain.¹⁰

Walaupun tidak ada petunjuk langsung mengenai kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga, Indonesia, seperti negara-negara lain di dunia, terus menghadapi berbagai ancaman dan tantangan keamanan yang kompleks. Partisipasi Indonesia di dalam BRICS dapat memberikan opsi yang menarik bagi negara ini dalam beberapa aspek :

Pertama, kerjasama ekonomi, sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memiliki akses yang lebih besar ke pasar-pasar penting yang diwakili oleh negara-negara BRICS lainnya. Ini akan membuka pintu bagi peningkatan perdagangan dan investasi, serta peluang untuk memperdalam kerja sama ekonomi di berbagai sektor. Kedua, sumber daya keuangan, melalui lembaga-lembaga keuangan BRICS seperti Bank Pembangunan Baru (*New Development Bank*, NDB) dan Persyaratan Penyimpanan Darurat yang Bersyarat (*Contingent Reserve Arrangement*, CRA), Indonesia dapat memperoleh akses ke sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan lainnya.

¹⁰ Firda Rosyana, RA dkk, " Pendekatan Negosiasi Konflik Dalam Resolusi Konflik", hlm. 60-61.

Ketiga, pengaruh politik, sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memiliki panggung yang lebih besar untuk mempengaruhi agenda politik secara global. Ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara BRICS lainnya dalam mempromosikan kepentingan bersama di forum-forum internasional seperti PBB, WTO, dan G20. Keempat, kolaborasi pembangunan berkelanjutan, BRICS memiliki komitmen yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bergabung dengan BRICS memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota lainnya dalam upaya mencapai SDGs, termasuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. Kelima, peluang diplomatik, dengan masuk keanggotaan dalam BRICS akan memberikan Indonesia akses yang lebih besar ke jaringan diplomatik yang luas. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring diplomatik Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara BRICS lainnya. Sehingga, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dapat menjadi opsi yang menjanjikan dengan membuka peluang baru dalam kerja sama ekonomi, akses sumber daya keuangan, pengaruh politik, kolaborasi pembangunan berkelanjutan, dan peluang diplomatik.

BRICS adalah singkatan yang merujuk pada kelompok lima negara dengan ekonomi yang berkembang pesat: Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Brasil, negara terbesar di Amerika Selatan dengan ekonomi yang kuat di sektor pertanian, pertambangan, manufaktur, dan jasa. Rusia, negara terbesar di dunia yang ekonominya didominasi oleh sumber daya alam seperti minyak dan gas alam. India, negara berpenduduk terbesar kedua di dunia, dengan ekonomi yang beragam dan sektor teknologi informasi serta jasa yang sangat maju. China, ekonomi terbesar kedua di dunia, terkenal dengan basis manufaktur yang kuat dan menjadi pusat perdagangan global. Dan Afrika Selatan, negara dengan ekonomi paling maju di Afrika, memiliki sektor pertambangan yang signifikan dan infrastruktur yang berkembang baik.

BRICS dibentuk untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, politik, dan budaya di antara anggotanya. Tujuan dan kegiatan penting BRICS meliputi, Kerja sama Ekonomi, dengan meningkatkan perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota. Pembangunan Infrastruktur, melalui inisiatif seperti New Development Bank (NDB), yang bertujuan mendanai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Ikut serta dalam pengaruh global, dengan meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi di kancah global serta memperjuangkan reformasi dalam organisasi internasional seperti PBB dan IMF.

BRICS secara rutin mengadakan pertemuan puncak untuk membahas isu-isu ekonomi, politik, dan sosial yang relevan, serta untuk memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggota. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, negara-negara BRICS telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dan signifikan sejak awal abad ke-21. Mereka memiliki potensi besar dalam hal populasi, pasar domestik, sumber daya alam, dan daya tarik investasi asing. Potensi ini menarik

perhatian global dan membuat mereka dilihat sebagai kekuatan ekonomi yang baru muncul.

Diversifikasi ekonomi global, BRICS berupaya menciptakan tatanan ekonomi dunia yang lebih seimbang dengan mengurangi dominasi negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Mereka bertujuan untuk meningkatkan pengaruh mereka dalam organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Kerjasama ekonomi dan politik negara-negara BRICS berusaha meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik di antara mereka. Melalui pertemuan puncak tahunan dan berbagai inisiatif kerjasama, mereka berusaha memperkuat hubungan perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur.

Pengaruh geopolitik internasional semakin terasa ketika bergabungnya Afrika Selatan pada 2010, BRICS menjadi lebih representatif secara geografis, mencakup semua benua utama di dunia. Ini memperkuat posisi mereka sebagai aliansi global yang signifikan dalam urusan geopolitik. Keinginan untuk reformasi institusi global menjadi alasan dan trigger tersendiri, BRICS mendorong reformasi institusi-institusi global seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia agar lebih mencerminkan realitas ekonomi dan politik saat ini, di mana negara-negara berkembang memiliki peran yang lebih besar.

Secara keseluruhan, BRICS muncul sebagai aliansi yang bertujuan mengubah dinamika ekonomi dan politik global, mempromosikan pembangunan yang lebih inklusif, dan memperkuat kerjasama di antara negara-negara berkembang. Pembentukan BRICS melalui serangkaian peristiwa dan perkembangan penting yang menandai munculnya aliansi ekonomi ini. Awal Konsep BRIC pada tahun 2001. Istilah "BRIC" diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs, Jim O'Neill, dalam laporan tahun 2001 yang mengidentifikasi Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok sebagai negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi besar dan calon kekuatan utama ekonomi global.

Pertemuan pertama pada tahun 2006, para menteri luar negeri dari Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok bertemu secara informal di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Pertemuan ini menandai dimulainya kerjasama formal antara negara-negara tersebut. KTT pertama pada tahun 2009), menjadi pertemuan puncak pertama negara-negara BRIC diadakan pada 2009 di Yekaterinburg, Rusia. Di pertemuan ini, para pemimpin BRIC membahas berbagai isu ekonomi dan politik global serta menekankan perlunya reformasi institusi global seperti PBB dan IMF. Bergabungnya Afrika Selatan pada tahun 2010 menjadi salah satu momentum, Afrika Selatan secara resmi diundang bergabung, mengubah BRIC menjadi BRICS. Dengan bergabungnya Afrika Selatan, aliansi ini menjadi lebih representatif secara geografis dan memperluas jangkauannya ke Afrika.

Pengembangan struktur organisasi pasca pembentukan BRICS, negara-negara anggota mulai mengembangkan berbagai mekanisme kerjasama, termasuk pertemuan puncak tahunan, pendirian Bank Pembangunan Baru (*New Development Bank*) pada 2014, dan cadangan *Contingent Reserve Arrangement*

(CRA) untuk mengurangi ketergantungan pada institusi keuangan Barat. Agenda kerjasama yang luas membuat BRICS memperluas agenda kerjasama mereka mencakup berbagai isu seperti perdagangan dan investasi, kesehatan, pendidikan, penelitian dan teknologi, serta keamanan dan stabilitas regional dan global.

BRICS berperan signifikan dalam ekonomi global dan geopolitik, yang ditunjukkan melalui berbagai inisiatif dan kontribusi nyata dengan pendirian Bank Pembangunan Baru (*New Development Bank*, NDB). Dibentuk pada 2014, NDB bertujuan mendanai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS dan negara berkembang lainnya. NDB telah menyetujui proyek-proyek bernilai miliaran dolar, termasuk sektor energi terbarukan, transportasi, dan sanitasi.

Inisiatif berikutnya yaitu Cadangan *Contingent Reserve Arrangement* (CRA), CRA adalah mekanisme cadangan keuangan senilai \$100 miliar untuk memberikan likuiditas melalui swap mata uang, membantu negara anggota menghadapi tekanan neraca pembayaran. Ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada IMF dan menyediakan alternatif bagi negara anggota yang membutuhkan bantuan keuangan mendesak.

Kerjasama ekonomi dan perdagangan, negara-negara BRICS telah meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota secara signifikan. Mereka mengadakan berbagai forum bisnis dan pameran dagang untuk mendorong hubungan ekonomi yang lebih erat. BRICS mengadakan KTT tahunan yang menghasilkan deklarasi bersama, mencakup berbagai isu mulai dari ekonomi global hingga perubahan iklim.

Deklarasi ini menunjukkan kesepakatan kolektif BRICS dalam berbagai masalah penting dan sering mencerminkan posisi alternatif terhadap kebijakan negara-negara Barat. Lebih lanjut, BRICS membuka inisiatif kesehatan global, selama pandemi COVID-19, negara-negara BRICS bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan vaksin serta berbagi sumber daya medis. Mereka berkomitmen memastikan distribusi yang adil dan aksesibilitas vaksin di negara berkembang. Peran BRICS terlihat jelas melalui upaya mereka menciptakan alternatif terhadap struktur keuangan dan ekonomi global yang ada, memperkuat kerjasama ekonomi, dan mendorong reformasi institusi internasional untuk mencerminkan realitas global yang berubah. Yang tidak kalah penting, BRICS memiliki peran yang signifikan dalam mendukung perdamaian dunia melalui serangkaian inisiatif dan usaha bersama yang menitikberatkan pada stabilitas politik, kerjasama internasional, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada Januari 2022, belum ada pengumuman resmi mengenai negara mana pun yang akan segera menjadi anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Meskipun demikian, sebelumnya telah ada spekulasi dan diskusi mengenai kemungkinan bergabungnya beberapa negara lain ke dalam kelompok ini, seperti Indonesia, Turki, Meksiko, dan Nigeria. Namun, belum ada keputusan konkret atau langkah resmi yang diambil dalam hal ini. Prospek bergabungnya

negara-negara baru ke dalam BRICS akan bergantung pada kesepakatan bersama dan evaluasi yang dilakukan oleh anggota BRICS yang sudah ada. BRICS kemudian mengumumkan enam anggota barunya, yakni Argentina, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang keanggotaannya mulai berlaku per 1 Januari 2024. Ini adalah keputusan yang paling tepat, bijak, dan masuk akal bagi Indonesia dengan bergabungnya Indonesia dalam BRICS berpotensi memberikan sejumlah manfaat penting. Apakah kepemimpinan era 2024-2029 yang dinahkodai oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akan mewujudkannya ?

C. Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam perhelatan dunia internasional, terutama dalam bidang perdamaian dunia, perannya sangat signifikan, karena sejarah panjang dalam misi perdamaian dunia, baik dari segi aktif dalam pengiriman bantuan perdamaian, negosiator perdamaian, bahkan sebagai juru damai di beberapa sengketa dan konflik antar negara, suaranya didengar dengan baik oleh negara-negara lain.

Siyasah Dauliah Indonesia di kancah dunia internasional dalam bidang perdamaian dunia, membawa harum negara Indonesia, selain aktif dalam tim juru damai, Indonesia juga mempunyai peranan strategis di karena history sebagai negara yang netral, objektif, dan berpihak kepada stabilitas dan keamanan dunia.

Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas, aktif, dan menjunjung demokrasi, membuat Indonesia diakui sebagai negara yang mampu berperan penting dalam menjaga ekosistem dan menyeimbangkan keamanan dan katahan dunia dari gejolak, sengketa, dan konflik.

Keikutsertaan Indonesia di organisasi-organisasi internasional juga membantu peran Indonesia dalam kancah pergaulan dunia, terutama pada negara-negara berkembang yang akan maju tinggal landas menuju impian sebagai negara maju.

Selain negara-negara Non-blok, Indonesia juga aktif dalam persahabatan dengan negara-negara maju di blok Barat. Ini menambah daya jual, daya saing, bahkan bergaining position Indonesia di kancah pergaulan dunia internasional.

Ada alternatif lain yang bisa Indonesia perankan, yaitu ikut serta dalam organisasi baru yang bernama BRICS, yang kebanyakan berisi dengan negara-negara maju yang terafiliasi dengan blok Timur. Dengan keikutsertaan Indonesia di keanggotaan BRICS, maka hampir dipastikan Indonesia berada pada tiga blok negara yang menjadi acuan dunia internasional, yaitu Non-blok, blok Barat, dan blok Timur.

Indonesia akan mendapatkan manfaat dari ketiga sisi, juga akan mampu mengambil peranan yang lebih luas dan daya jelajah cakupan yang jauh dalam hal eksistensinya sebagai negara yang berpihak pada perdamaian dunia, stabilitas dunia, dan keamanan duni internasional

DAFTAR PUSTAKA

A.Ratna Wulan, *"Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik (Siyasah Dauliyah)"*, Bandung, ejurnal Sunan Gunung Jati.

Firda Rosyana, RA dkk, *"Pendekatan Negosiasi Konflik Dalam Resolusi Konflik"*.

Firda Rosyana, RA dkk, *"Pendekatan Negosiasi Konflik Dalam Resolusi Konflik"*, Jurnal ICMES, Vol.3, Nomor.1 Juni 2019.

H.A. Djazuli, *"Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah"*, Jakarta, Kencana, 2009.

<https://nu.or.id/ilmu-al-quran/9-ayat-perdamaian-dalam-al-qur-an-d8KgR>

Ija Suntana, *"Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)"*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.

Iqbal Muhammad, *"Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Islam"*, Jakarta, Prenadamedia, 2014.

Juhaya. S. Praja, *"Pemikiran Ketatanegaraan Islam"*, Bandung, Pustaka Setia, 2010.

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*. Cet ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*.

Muhammad Ashri mengutip Wahbah Al-Zuhaili, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t).

Zainul Erfan, Ahmadi Hasan, Masyitah Umar, Nuril Khasyiin, *Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia)*

Novia Aisyah, *"Fakta Hari Toleransi Internasional, Pasca Konflik Rasial dan Budaya"*,

Detik Edu.